

Aktor Pemilu

Pemerintah dan Aparat Lainnya

Jumat, 08 Mei 2020, Pukul 13.30-15.00 WIB

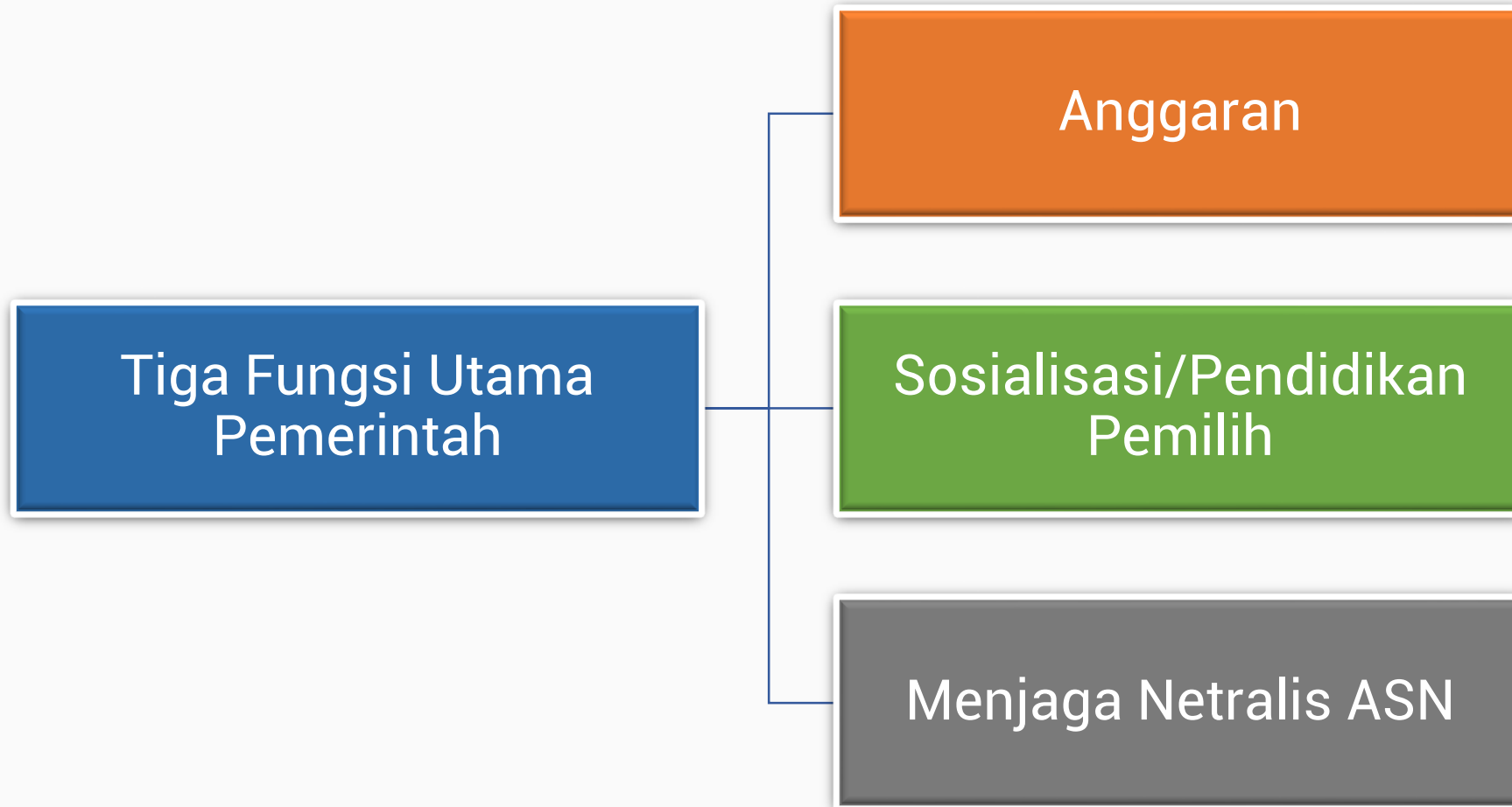
Fadli Ramadhanil, Peneliti Perludem
Heroik Mutaqin Pratama, Peneliti Perludem

Kelas Virtual Perludem





Pemerintah



Fungsi Anggaran

- ✓ *Cost of Registration and Elections* (CORE) membagi pembiayaan pemilu menjadi tiga kategori:
 - a. *Core costs (or direct costs)*/biaya inti pemilu adalah biaya yang rutin untuk mengimplementasikan proses pemilu dalam lingkungan pemilu yang stabil;
 - b. *Diffuse costs(or indirect costs)*/biaya tidak langsung merupakan biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa yang tidak bisa dilepaskan ke dalam anggaran umum dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu; dan
 - c. *Integrity costs* adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan keamanan, integritas, netralitas politik, dan ranah kompetisi dalam proses pemilu (Wall et.al. 2006, 178).

- ✓ Sumber pendanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia:
 - Pemilu legislatif dan presiden berasal dari APBN
 - Pemilu Kepala Daerah berasal dari APBD

Problematika Anggaran Pilkada Melalui APBD

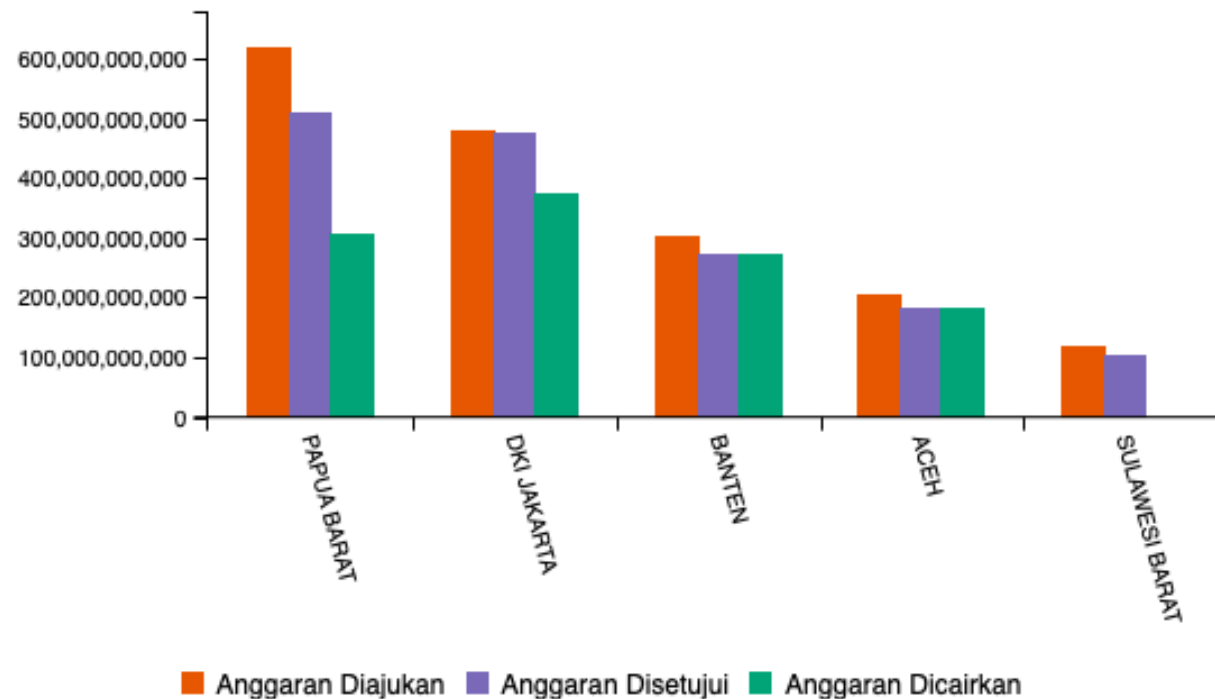


POTRET ANGGARAN PILKADA 2017

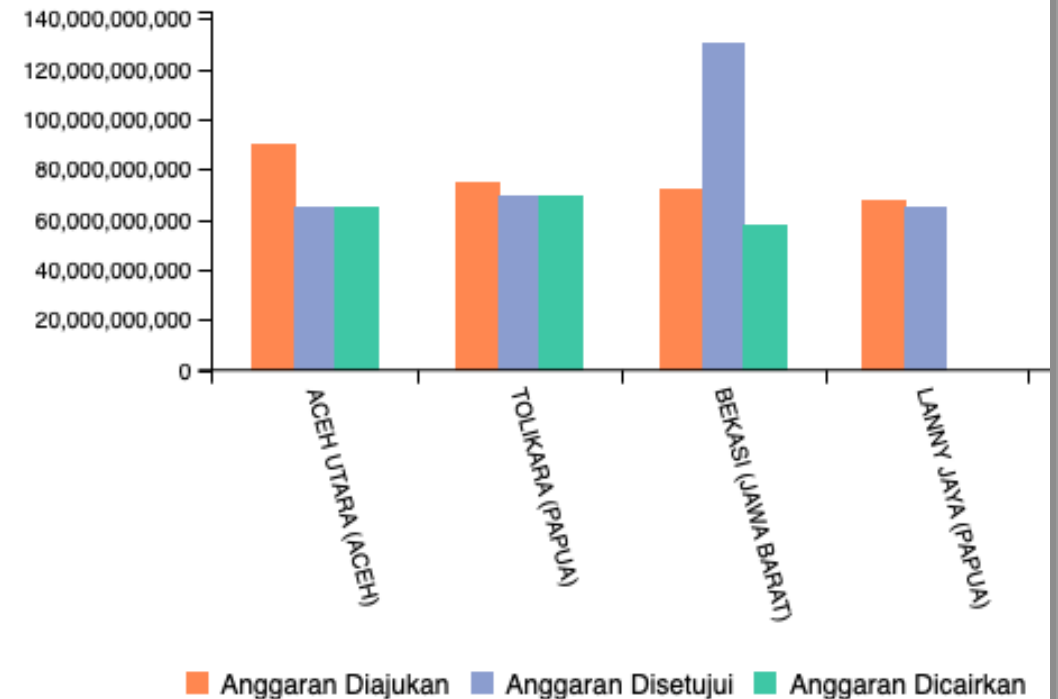
Anggaran

Anggaran pada Pilkada 2017.

Rekap Top 5 Propinsi Anggaran



Rekap Top 5 Kabupaten-Kota Anggaran



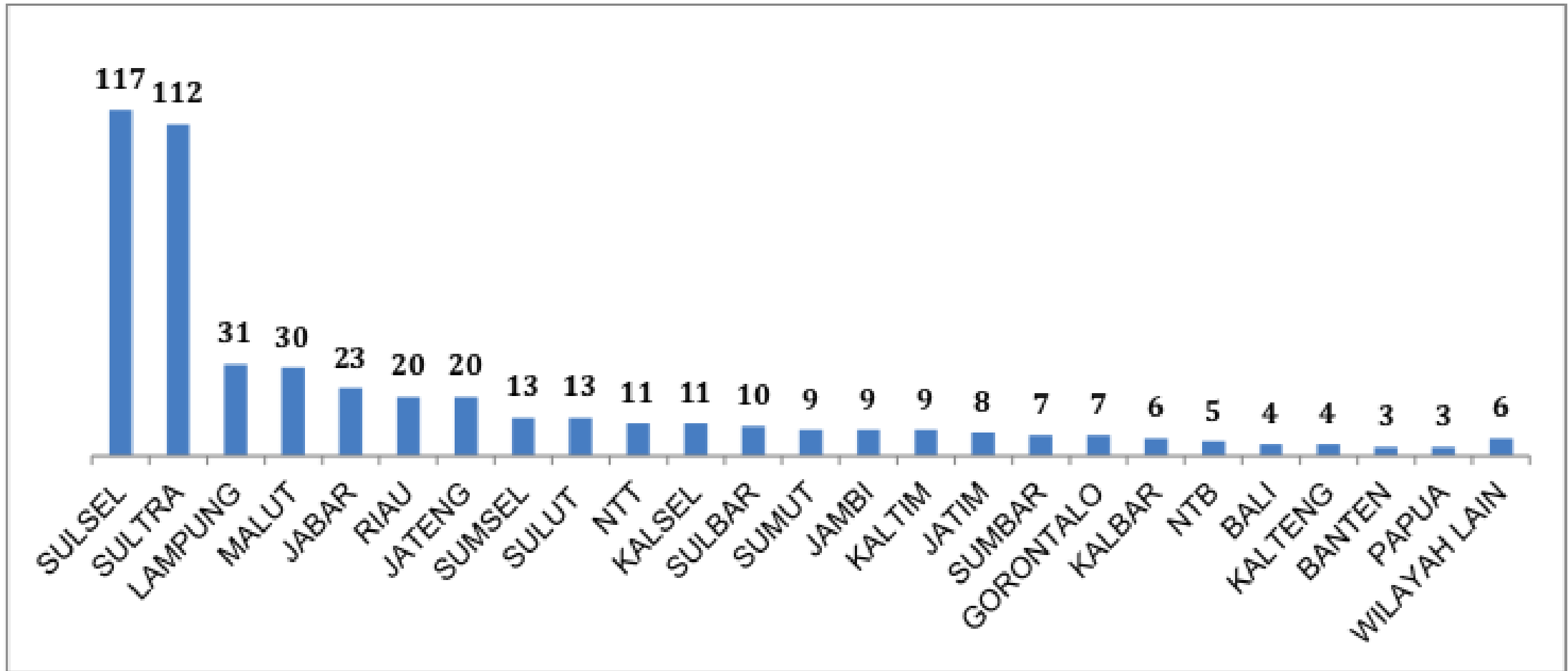
Perbandingan Besaran Anggaran Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada 2018

NO.	DAERAH PILKADA PROVINSI	ANGGARAN YANG DIAJUKAN	ANGGARAN YANG DISETUJUI	SELESIH	% PERSETUJUAN	PETAHANA
1	BALI	254,379,000,000	229,360,000,000	-25,019,000,000	90.16	Ada
2	JAWA BARAT	1,169,069,888,655	724,900,014,308	-444,169,874,347	62.01	Ada
3	JAWA TENGAH	1,131,467,752,475	992,241,792,000	-139,225,960,475	87.70	Ada
4	JAWA TIMUR	817,246,782,439	817,246,782,439	0	100.00	Ada
5	KALIMANTAN BARAT	280,059,250,000	260,217,000,000	-19,842,250,000	92.91	Tidak Ada
6	KALIMANTAN TIMUR	428,959,011,298	310,000,000,000	-118,959,011,298	72.27	Tidak Ada
7	LAMPUNG	276,958,511,198	267,931,324,424	-9,027,186,774	96.74	Ada
8	MALUKU	258,244,609,000	200,000,000,000	-58,244,609,000	77.45	Ada
9	MALUKU UTARA	222,643,663,495	222,643,663,495	0	100.00	Ada
10	NUSA TENGGARA BARAT	203,000,000,000	167,515,450,000	-35,484,550,000	82.52	Ada
11	NUSA TENGGARA TIMUR	318,234,000,000	318,530,930,000	296,930,000	100.09	Ada
12	PAPUA	1,268,375,514,580	850,000,000,000	-418,375,514,580	67.01	Ada
13	RIAU	383,759,579,830	324,000,000,000	-59,759,579,830	84.43	Ada
14	SULAWESI SELATAN	470,532,782,520	456,420,738,454	-14,112,044,066	97.00	Ada
15	SULAWESI TENGGARA	464,563,827,489	258,680,582,000	-205,883,245,489	55.68	Tidak Ada
16	SUMATERA SELATAN	405,487,803,000	318,000,000,000	-87,487,803,000	78.42	Ada
17	SUMATERA UTARA	995,217,190,233	855,940,086,000	-139,277,104,233	86.01	Tidak Ada
	BESARAN ANGGARAN RATA-RATA	549,894,068,600.71	445,507,550,771.77			

Kerangka Hukum Netralitas ASN

- ✔ Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN; salah tujuan dari UU ini adalah “membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, netral, bebas dari intervensi politik, dan bebas KKN;
- ✔ Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang asas netralitas dalam penyelenggaraan kebijakan ASN;
- ✔ Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
- ✔ Pasal 4 angka 12 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: “dilarang memberikan dukungan kepada calon pres dan wapres, DPR, DPD dan DPRD, pilkada

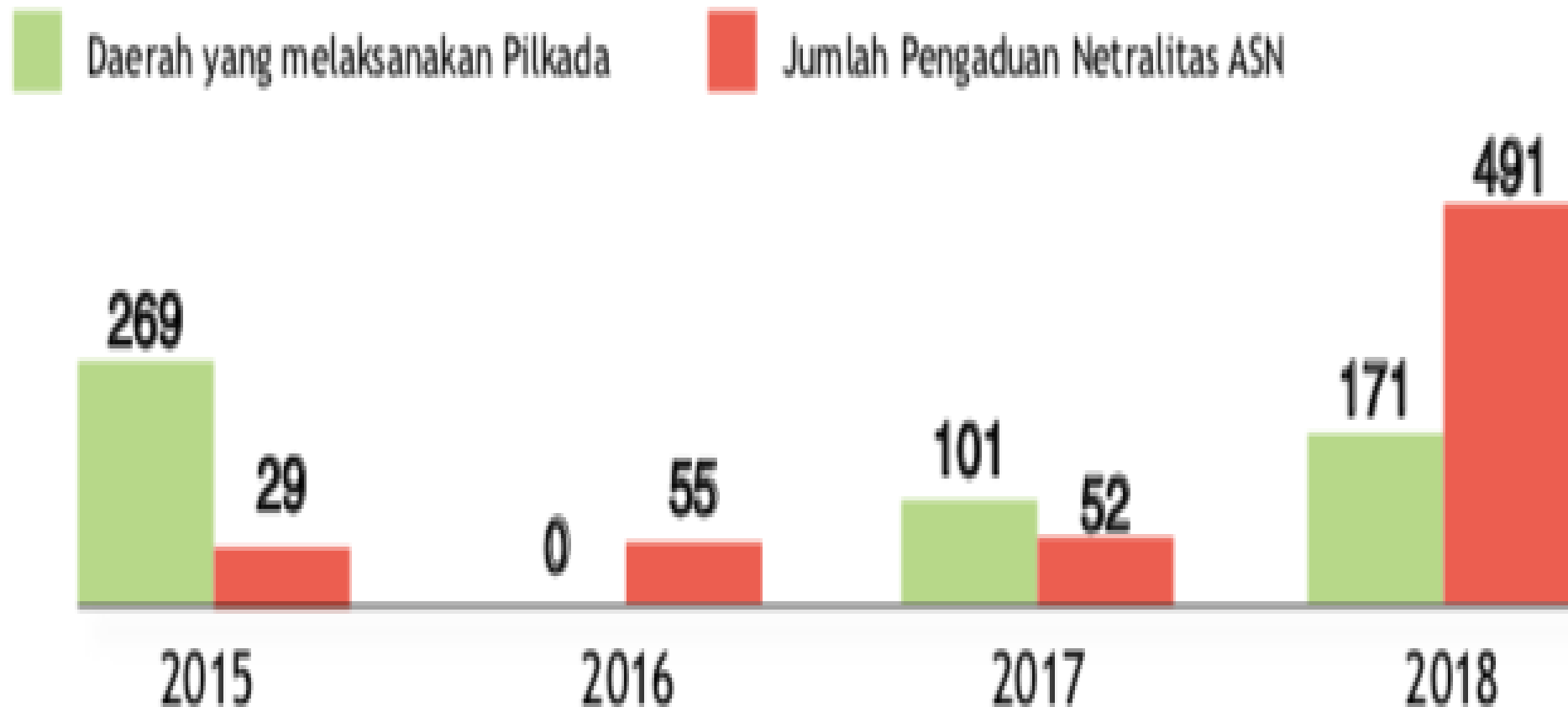
Data Pengaduan Pelanggaran Netralitas ASN Per Provinsi Tahun 2018



Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, (Data Per Desember 2018)

Sumber: KASN 2018, "Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara" Buku 1, Edisi 1

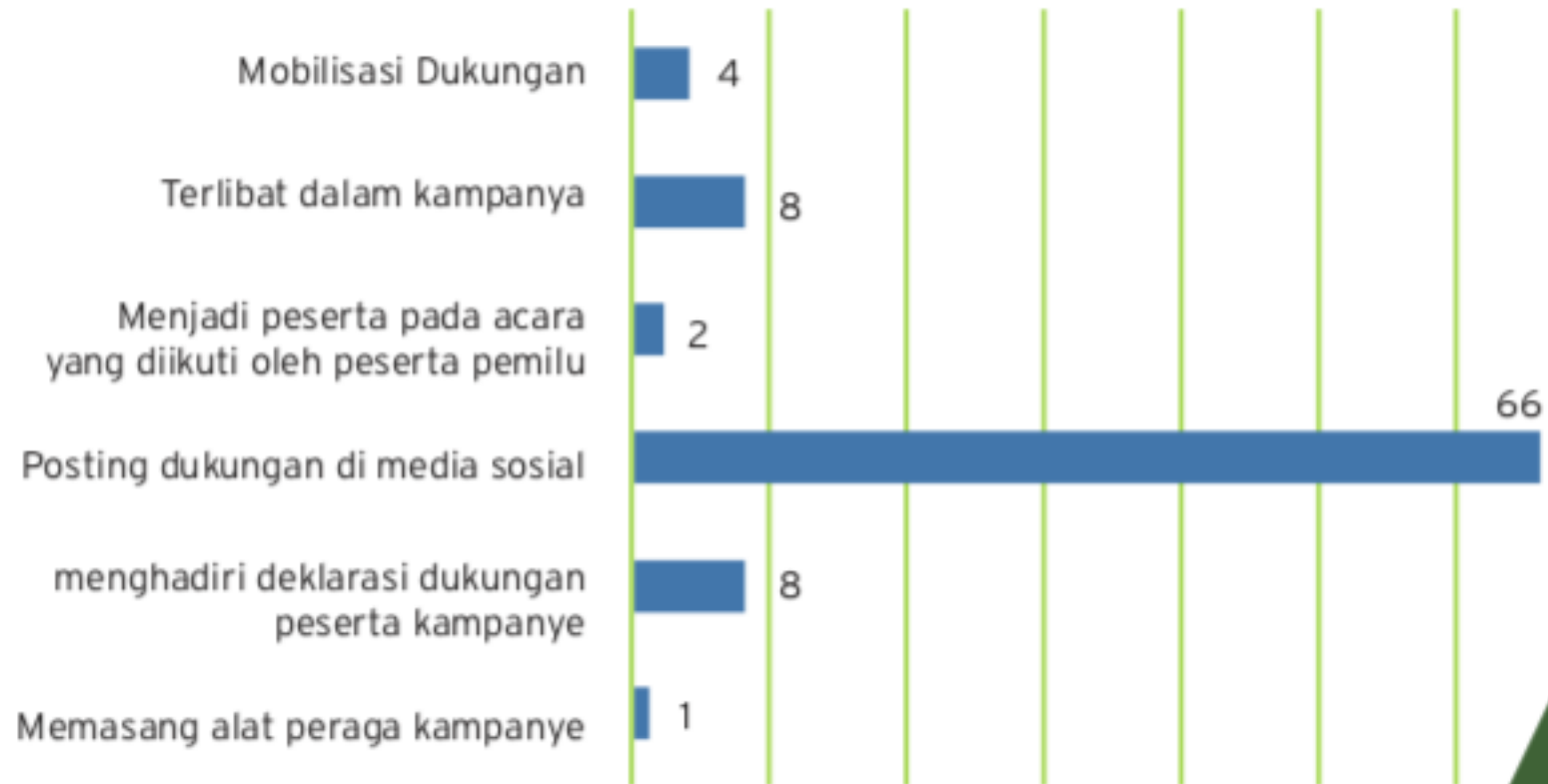
Gambar 1. Pengaduan atas Pelanggaran Asas Netralitas ASN terkait Pilkada Tahun 2015 – 2018



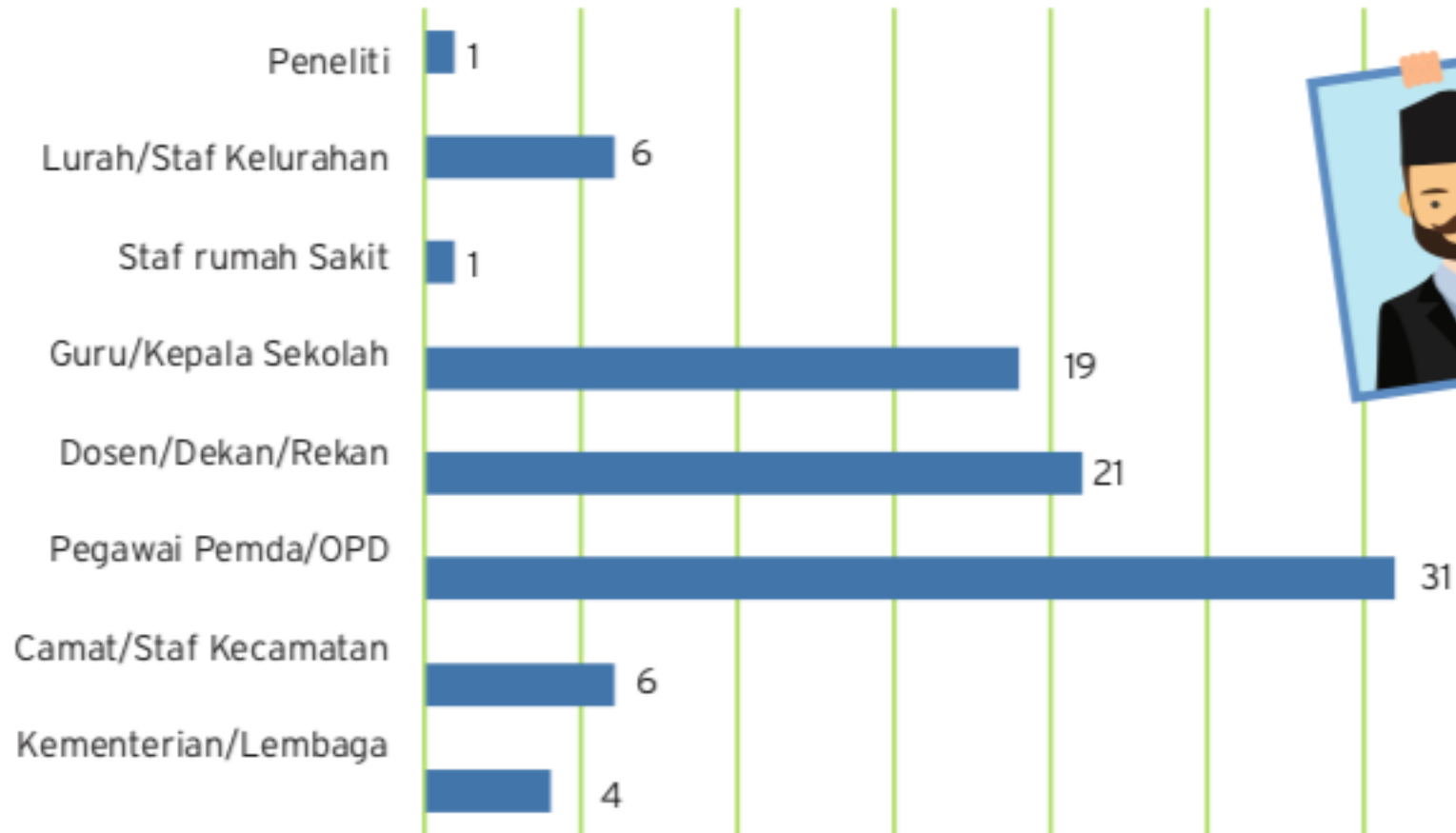
Keterangan: tahun 2016 tidak ada Pilkada serentak.

Sumber: Diolah oleh Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, KASN
(Dari Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN & portal berita online, 2018)

Jenis Pelanggaran Netralitas ASN

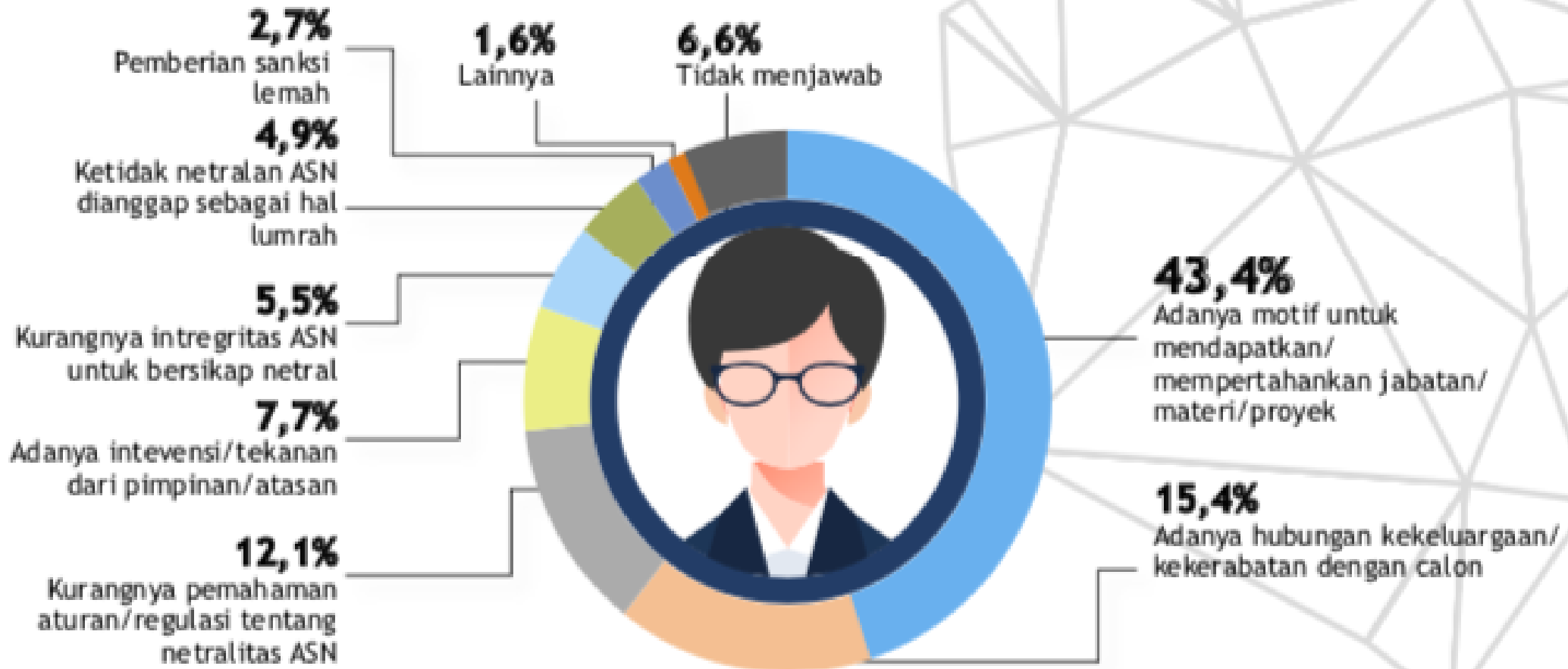


Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data Pemantauan (diolah)

Gambar 3. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN



Sumber: Hasil Survei Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, KASN 2018

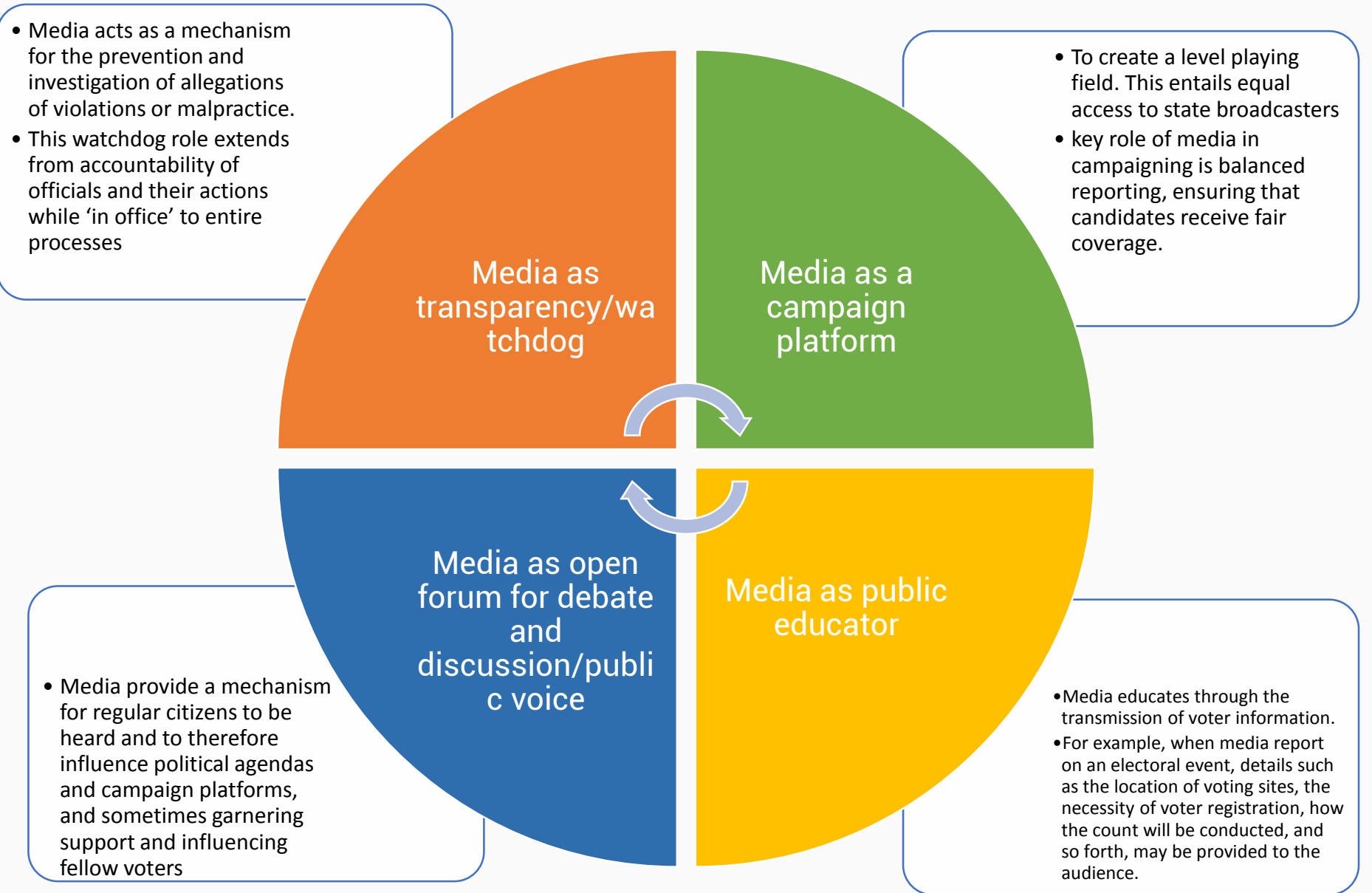
Kendala Dalam Pengawasan Netralitas ASN

NO.	KENDALA	%
1	Kurangnya komitmen ASN untuk bersikap netral dan profesional	13.2
2	Pemberian sanksi yang lemah dan tebang pilih	12.6
3	Kurangnya sosialisasi sehingga banyak ASN yang tidak tahu aturan	11.0
4	Tradisi dan budaya mencari perhatian dari politisi/kepala daerah untuk bisa mendapat jabatan	10.4
5	Adanya kegiatan dukung mendukung karena hubungan kekeluargaan/kekerabatan	8.8
6	Pengawasan netralitas yang masih belum baik dan mapan	7.7
7	Politisasi birokrasi oleh kepala daerah petahana	6.6
8	Atasan/pimpinan yang bersikap tidak netral (tidak ada teladan)	3.8
9	Lingkungan kerja yang tidak mendukung untuk bersikap netral	3.3
10	Kepala daerah berpolitik	2.7
11	Tidak jawab	19.8

Sumber: Hasil survey Bidang Pengkajian dan Pengembangan KASN, 2018

Sumber: KASN 2018, "Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara" Buku 1, Edisi 1

4 Peran Utama Media di Pemilu Menurut AceProject



Membangun Relasi Penyelenggara Pemilu dan Media

- ✓ mengidentifikasi media-media yang relevan beserta liputan mereka;
- ✓ mengidentifikasi tokoh-tokoh penting di dunia pers yang dapat menjamin akurasi dan efektivitas penyampaian informasi;
- ✓ bersifat proaktif dan transparan dalam merilis informasi kepada media;
- ✓ memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada media jelas dan mudah dimengerti;
- ✓ membuat tabel waktu dan jadwal perilsan informasi ke pemilu;
- ✓ menunjuk satu orang juru bicara LPP dan satu orang juru kontak untuk mempermudah komunikasi antara lembaga dan media; dan
- ✓ membuat *media centre* di dalam LPP.

Aktor Keamanan: Kepolisian dan TNI

- ✔ Sesuai dengan UU Kepolisian dan UU TNI, setiap personil Polisi dan TNI harus netral, dan dilarang untuk terlibat di dalam kegiatan politik praktis;
- ✔ Khusus Polisi, di dalam proses penyelenggaraan pemilu punya dua fungsi langsung yang utama:
 1. Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu;
 2. Sebagai organ penegakan hukum pemilu, baik di dalam sentragakumdu (Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan), maupun di dalam tahap penyidikan organisasi kepolisian;

Kejaksaan

- ✔ Kejaksaan juga diharuskan untuk wajib menjaga netralitas dan tidak terlibat di dalam agenda politik praktis;
- ✔ Dalam pelaksanaan pemilu, Kejaksaan juga punya peranan langsung di dalam proses penegakan hukum pemilu, khususnya pidana pemilu;
- ✔ Kejaksaan salah satu organ yang ada di dalam sentragakumdu bersama dengan Bawaslu dan Kepolisian;
- ✔ Kejaksaan juga yang akan menuntut pelaku pidana pemilu ke pengadilan

Peradilan

- ✔ Lembaga peradilan punya peranan penting selama tahapan pemilu;
- ✔ Lingkungan peradilan umum di level Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berperan dalam menerima, memeriksa, dan memutus tindak pidana pemilu;
- ✔ Lingkungan peradilan tata usaha negara, berwenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. Untuk pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang memiliki peran adalah PTUN (putusan final dan mengikat);
- ✔ Sedangkan untuk Pilkada, yang punya peran adalah PTTUN (tingkat pertama) dan MA (Kamar TUN) (untuk level kasasi)
- ✔ Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilu;

Lembaga yang Tidak Terlibat Langsung

- ✓ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini punya peranan yang sangat strategis selama pemilu, khususnya untuk melihat dan menganalisis transaksi keuangan untuk kebutuhan kampanye;
- ✓ Kewenangan dan peran PPATK akan sangat membantu untuk menginvestigasi dan melacak kejujuran dan transparansi dana kampanye di dalam pemilu;
- ✓ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu praktik korupsi yang ditangani KPK adalah korupsi politik yang melibatkan pejabat yang dipilih melalui proses pemilu. KPK dalam beberapa kali pemilu ikut terlibat memberikan pendidikan politik kepada pemilih;

Lembaga lain yang Tidak Terlibat Langsung

- ✓ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam beberapa pemilu terakhir, lembaga ikut menjaga konsistensi iklan kampanye di lembaga penyiaran. Dalam Pemilu 2019, terdapat Pokja yang diisi oleh KPI, KPU, dan Bawaslu untuk menyamakan persepsi terkait frekuensi iklan kampanye di lembaga penyiaran;
- ✓ Komnas HAM. Komnas HAM juga aktif terlibat memberikan kajian, rekomendasi, dan upaya perlindungan terhadap hak asasi warga negara di dalam penyelenggaraan pemilu